

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEMBAGA ADAT ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN DI KOTA BANDA ACEH

**RIFQAH SESARINA**

## **ABSTRACT**

*In Article 98, Paragraph 2 of Law No. 11/2006 on Aceh Administration states that the resolution of the problem of social condition in adat way is done through an adat body. The result of the research showed that the reason of the Aceh community in Banda Aceh to have Aceh Adat Body as the place where they can settle the dispute in the distribution of inheritance because the resolution through negotiation in the level of gampong voluntarily in its process, on target procedure, the decision is not like the ruling of the Court (win or lose). The mechanism of the resolution of the dispute in the distribution of inheritance by Adat Body in Banda Aceh is done through a process which involves the Gampong Adat Body such as keuchik and other Gampong apparatus. In practice, the implementation of the decision of Aceh Adat Body in settling the dispute in distributing inheritance in Banda Aceh is regarded as a judge's verdict which is prevailing and binding the parties or the heirs who are in dispute.*

**Keywords:** *Adat Body, Dispute in Inheritance, Resolution of Dispute*

## **I. Pendahuluan**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris.

Dalam masyarakat adat Aceh di Provinsi Aceh, dimana banyak ditemukan berbagai permasalahan dalam masyarakat diselesaikan melalui lembaga adat setempat. Salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh adalah selalu menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah yang melibatkan lembaga-lembaga adat, di mana pembagian warisan melalui lembaga adat yang bersendikan syariat Islam, karena masyarakat Aceh yang umumnya menganut agama Islam memegang teguh prinsip syariah. Agama Islam yang

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, di Provinsi Aceh hukum agama dan hukum adat memegang peranan penting dalam masyarakat, walaupun pernah mengalami kevakuman di Aceh pada masa orde baru, maka masyarakat Aceh menuntut pemerintah agar memberlakukan kembali syari'at Islam di Aceh. Tuntutan ini disikapi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mencetuskan beberapa ketentuan perundang-undangan yang pada intinya mempertegas terlaksananya syari'at Islam lebih besar karena memungkinkan pembentukan Peradilan Syari'at Islam di Aceh.<sup>1</sup>

Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan bahwa :

- 1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- 2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Perkembangan pemerintahan Aceh dewasa ini dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, maka telah ditetapkan sepuluh lembaga adat, yaitu *Imeum Mukim* (kepala/pemimpin pemerintahan mukim), *Geuchik* (kepala/pemimpin pemerintahan Gampong), *Tuha Peuet* (empat orang tetua Gampong), *Tuha Lapan* (delapan orang perwakilan gampong), *Imeum Meunasah* (Imam Mesjid/Meunasah), *Keujruen Blang* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani), *Panglima Laot* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan nelayan), *Peutua Seneubok* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani ladang), *Haria Peukan* (pemimpin atau yang dituakan pedagang pasar, dan *Syahbanda* (pemimpin atau yang dituakan di pelabuhan/Bandar).

Kemudian Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat satu lembaga adat lagi yaitu Majelis Adat Aceh

---

<sup>1</sup>Muchlis, *Membangun Peradilan Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam*, <http://www.badilag.net/html>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2013

(MAA). Di antara lembaga-lembaga adat yang disebutkan di atas, *geuchik* atau *keuchik* yang setingkat dengan lurah berperan besar sebagai pengendali sosial masyarakat dalam mengatur setiap kebijakan yang berada dalam wilayah hukumnya, termasuk di dalamnya kebijakan tentang hukum syari'at Islam dan sengketa pembagian warisan. Hal ini kemudian menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai peran dan fungsi lembaga adat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian warisan di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Aceh di Kota Banda Aceh memilih lembaga adat Aceh sebagai tempat menyelesaikan sengketa pembagian warisan ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pembagian warisan oleh lembaga adat Aceh di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan lembaga adat Aceh dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Kota Banda Aceh ?

Sesuai permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kota Banda Aceh memilih lembaga adat Aceh sebagai tempat menyelesaikan sengketa pembagian warisan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pembagian warisan oleh lembaga adat Aceh di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan lembaga adat Aceh dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Kota Banda Aceh.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, karena menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa warisan melalui Lembaga Adat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan pembentukan hukum dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan dalam masyarakat adat Aceh.

Sumber data utama dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data-data hukum sekunder tersebut meliputi berbagai macam sumber baik

sumber data tertulis seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku ilmiah, dan berbagai macam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal seorang peneliti diharapkan dapat mengumpulkan sebanyak mungkin bahan pustaka yang terkait dengan objek penelitiannya sehingga dapat menambah khasanah dalam menganalisis data dan menyajikan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan beberapa responden dan informan sebagai narasumber. Metode analisis data dilakukan melalui metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi. Walaupun dalam penelitian ini nantinya akan bersinggungan dengan perspektif disiplin ilmu lainnya, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perspektif disiplin lain hanya sekedar alat bantu.<sup>2</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu menafsirkan mekanisme penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui Lembaga Adat Aceh. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui induktif.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Masyarakat Aceh di Kota Banda Aceh memilih lembaga adat Aceh sebagai tempat menyelesaikan sengketa pembagian warisan**

Di dalam masyarakat adat Aceh yang menjalankan syariat Islam dalam hal penyelesaian sengketa selalu mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah. Demikian pula halnya dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan dalam masyarakat di Aceh termasuk di Kota Banda Aceh khususnya dalam melakukan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Masyarakat Aceh dalam menyelesaikan masalah warisan yang terjadi di tingkat *Gampong*, masyarakat biasanya memilih untuk melibatkan lembaga adat di tingkat *Gampong* seperti seperti *Keuchik*, *Imeum Meunasah* dan perangkat *gampong* lainnya. Dengan kata lain dalam hal penyelesaian sengketa termasuk dalam hal ini sengketa dalam

---

<sup>2</sup>Alvi Syahrin, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 17.

pembagian warisan di tingkat *gampong* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan perangkat *gampong*.

Kondisi ini juga didukung Pasal 12 Qanun Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, bahwa *Keuchik* dan *Imeum Meunasah* adalah pimpinan rapat adat *gampong*. Hal ini dibenarkan oleh Muhammad Zaki, bahwa di wilayahnya penyelesaian sengketa pembagian warisan juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat Aceh, di mana berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional yang dilakukan dengan melibatkan perangkat adat mulai di tingkat terendah. Di wilayahnya saat ini mengakui dua komunitas perkembangan penduduk, yaitu *Gampong*, merupakan kesatuan masyarakat hukum dan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah *Mukim* yang menempati wilayah tertentu. Dalam hal penyelesaian sengketa pihaknya sering kali dilibatkan dalam musyawarah pembagian sebagai penengah di antara para ahli waris.<sup>3</sup>

M. Ali juga membenarkan bahwa masyarakat *gampong* pada awalnya dalam pembagian warisan pihak keluarga ahli waris sebelum melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu mengawalinya dengan mengurus surat keterangan kematian dan ahli waris. Kemudian pada saat itulah disampaikan niatan untuk menyelesaikan pembagian warisan secara damai sehingga tidak menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Oleh karena itu, pihak aparat *gampong* menyarankan agar penyelesaian diupayakan melalui musyawarah dengan melibatkan lembaga adat *gampong*. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan upaya tersebut tidak membawa hasil sehingga harus diselesaikan melalui Mahkamah Syariaah.<sup>4</sup>

Dalam penyelesaian sengketa termasuk sengketa pembagian warisan lembaga adat *gampong* memegang peranan sebagai penengah. *Gampong* dimaksud termasuk *Gampong Lampaseh Kota* adalah wilayah setingkat desa atau kelurahan yang dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih oleh masyarakat sebagai Kepala Badan Eksekutif *Gampong* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Muhammad Zaki, Keuchik Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, di *Gampong Lampaseh Kota*, Tanggal 20 April 2013

<sup>4</sup>Wawancara dengan M Ali, Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, Tanggal 9 April 2013

dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian *Gampong* merupakan kawasan pertumbuhan, pembinaan dan pengembangan adat budaya, di mana pusat pengendaliannya ada pada fungsi *Meunasah*, karena itu dapat dikatakan bahwa *Meunasah* adalah lambang budaya adat Aceh. *Keuchik* dibantu oleh peurangkat gampong yang terdiri dari:

1. *Imeum Meunasah / Tgk. Sagoe*, yang mengurus bidang agama.
2. *Tuha Peut dan Tuha Lapan*, sebagai pembantu, perencana, pelaksana, pengawas.
3. Sekretaris *Gampong*, pelaksana dan pelayan administrasi.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa pembagian warisan termasuk melalui musyawarah dengan lembaga adat *gampong* seperti *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah* dan perangkat lainnya dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini penting sebagai landasan bagi *keuchik* dan perangkat gampong untuk bertindak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan, oleh karena harta warisan yang dibagi tersebut dikuasai aspek hukum publik dan hukum privat. Dalam hal ini sebagian harta warisan juga harus melibatkan aparat pemerintahan lainnya, seperti peralihan harta warisan yang berbentuk tanah, rumah maupun objek warisan lainnya tidak semua dapat diselesaikan hanya melalui lembaga adat tetapi juga melibatkan Notaris PPAT, Kantor Pertanahan atau Mahkamah Syariahy sebagai pihak yang menetapkan ahli waris.<sup>6</sup>

Pemilihan metode penyelesaian sengketa pembagian warisan ini sepenuhnya ada pada para ahli waris apakah akan menempuh melalui lembaga adat *gampong* atau melalui peradilan. Kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar putusan hasil musyawarah tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Apabila adanya penyelesaian pasti dengan sendirinya ada permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Muhammad Zaki, Keuchik Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, Tanggal 20 April 2013

<sup>6</sup>Wawancara dengan Mukhsin Putra Haspy, Notaris di Banda Aceh. Tanggal 12 Mei 2013.

bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah warisan, dan dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu para ahli waris yang merasa berhak atas warisan. Dalam masalah sengketa tanah seperti halnya dengan masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. Pada umumnya prosedur penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga mediasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dengan jalan menunjuk *keuchik* sebagai seorang mediator dan disaksikan oleh saksi-saksi yang terdiri dari perangkat *gampong*.<sup>7</sup>

Metode penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat *gampong* ini merupakan suatu wadah pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi di *gampong*. Dalam Rapat Adat *Gampong* inilah perselisihan antara ahli waris dicoba diselesaikan dengan damai. Pimpinan rapat dalam mengambil keputusan lebih banyak mengandalkan saksi sebagai alat bukti.

Melalui mekanisme ini kejujuran seorang saksi amat menentukan keputusan akhir musyawarah tersebut. Selain itu, pengetahuan aparat *gampong* juga ikut menentukan hasil keputusan rapat itu. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini mencakup pengetahuan tentang materi hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan pengetahuan tentang asal usul harta dan silsilah keluarga dari para ahli waris. Untuk menunjang pengetahuan aparat *gampong* tentang materi hukum, tak jarang seorang *teungku* (ulama) dari dayah diundang untuk menyampaikan ilmunya mengenai kewarisan Islam dalam rapat tersebut. Keputusan yang dibuat pada akhir rapat itu tidak selalu memuaskan semua pihak, dan karenanya *keuchik* dan *imeum meunasah* sering mewanti-wanti pihak-pihak yang bertikai untuk dapat menerima keputusan akhir dengan hati ikhlas.<sup>8</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa dalam pembagian warisan merupakan persengketaan yang paling sering terjadi dalam masyarakat termasuk di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Persengketaan yang

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan M Ali, Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, Tanggal 9 April 2013

<sup>8</sup>Wawancara dengan Wahyu Mimbar, Ustad/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, Tanggal 6 mei 2013

terjadi dimaksud tentunya memerlukan adanya upaya untuk penyelesaiannya. Dalam masyarakat adat Aceh upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih mengutamakan jalan damai termasuk dalam hal ini penyelesaian sengketa tanah di tingkat *gampong*, dimana masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa pembagian warisan secara adat melalui lembaga adat di tingkat *gampong* yaitu *keuchik* dan perangkat *gampong* lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dipilihnya lembaga penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat Aceh khususnya pada tingkat *gampong* ini dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara damai tanpa harus melibatkan lembaga peradilan. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibnu Syakdan salah seorang perangkat *gampong* yang sering menjadi tempat bagi warga atau pihak yang melaporkan berbagai permasalahan dan kondisi masyarakat yang terjadi di wilayahnya. Ia sebagai sekretaris *gampong* juga sering dilibatkan dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat termasuk sengketa yang menyangkut pembagian warisan baik mengenai sengketa batas tanah warisan, sengketa milik maupun sengketa dalam pembagian warisan yang menyangkut tanah. Dalam hal ini ia sering terlibat dalam penyusunan suatu kesepakatan antara para pihak setelah melalui upaya damai dengan musyawarah antara para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Sebagai Contoh dapat dilihat pada dua Kasus berikut :

1. Pembagian Warisan yang dilakukan oleh Lembaga Adat di *Gampong* Blang Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, atas ahli waris Muhammad bin Sofyan dan Marlinda binti Sofyan.

Pada awalnya ahli waris laki-laki Muhammad bin Sofyan menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya di *Gampong* Blang sehingga ahli waris perempuan berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Syarriyah. Namun atas saran pihak keluarga lainnya dan juga tokoh masyarakat di *Gampong* Blang keduanya sepakat untuk membagi harta peninggalan orang tuanya yang dimediasi oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut Gampong* Blang Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibnu Syakdan, Tokoh Masyarakat/tSekretaris *Gampong* Deah Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Tanggal 7 Mei 2013.



2. Pembagian Warisan yang dilakukan oleh Lembaga Adat di *Gampong* Lampoh Daya Kecamatan Jayabaru Banda Aceh, atas ahli waris Muntasir Fuadi dan Ridha Fahmi atas warisan Almh Fatimah bin Budiman berupa sepetah tanah yang terletak di *Gampong* Lampoh Daya.

Pada awalnya salah satu ahli waris juga menguasai sendiri harta warisan peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan hak saudara kandungnya sehingga ahli waris lainnya kemudian menuntut haknya dan berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Syariah. Namun atas saran pihak keluarga lainnya dan juga tokoh masyarakat di *Gampong Blang* keduanya sepakat untuk membagi harta peninggalan orang tuanya yang dimediasi oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut Gampong* Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh.

Kedua kasus tersebut menggambarkan bahwa para ahli waris walaupun timbul keinginan untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Syariah tetapi lebih memilih untuk penyelesaian dengan jalan damai melalui mediasi yang melibatkan lembaga adat di tingkat *gampong*. Tata cara semacam ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat Aceh sehingga dapat dikatakan masyarakat Aceh dalam melakukan pembagian warisan telah melakukan metode *uruf/adat* atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut beberapa warga yang ditemui diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan melalui *keuchik* dan perangkat *gampong* ini lebih dipilih warga mengingat dapat segera diperoleh hasilnya melalui musyawarah dan tidak memerlukan biaya yang besar dan jangka waktu yang lama apabila penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan. Jadi dengan kata lain, penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui *keuchik* perangkat *gampong* ini dapat menghemat waktu dan biaya dan juga dilakukan dengan jalan damai dan saling menguntungkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa alasan yang mendasari masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga adat pada tingkat *gampong* karena penyelesaian melalui musyawarah di

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Nurhanifah, Raliyah H. Itam, Che' Nah, Warga masyarakat di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, Tanggal 20 - 21 Mei 2013 .

tingkat *gampong* bersifat sukarela dalam prosesnya, prosedur yang tepat sasaran, keputusan bukan layaknya putusan lembaga peradilan (menang atau kalah) karena keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil dan keputusan bertahan sepanjang waktu. Upaya penyelesaian melalui *keuchik* dan aparat *gampong* juga tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan dimana dalam penyelesaian sengketa ini *keuchik* beserta aparat *gampong* juga memiliki kewenangan untuk bertindak layaknya hakim dalam suatu sengketa. Jadi dalam hal ini *keuchik* dan perangkat *gampong* yang telah menjadi hakim perdamaian dalam suatu sengketa bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari tugasnya selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat *gampong*.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Oleh Lembaga Adat Aceh Di Kota Banda Aceh**

Dalam proses atau mekanisme penyelesaian sengketa pembagian warisan oleh lembaga adat Aceh di Kota Banda Aceh ini biasanya dilakukan melalui perdamaian. Perdamaian pada dasarnya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kesepakatan antara para pihak sendiri maupun dengan melibatkan seorang pemimpin atau orang yang dituakan atau lembaga adat di tingkat *gampong* seperti halnya *keuchik* dan perangkat *gampong* lainnya untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian tersebut. Dalam hal ini biasanya dilibatkan seorang tokoh masyarakat *gampong* yang mengerti ilmu agama yang mengetahui dan mengerti mengenai pembagian harta warisan.<sup>11</sup>

Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan juga dapat dilaksanakan dengan melibatkan lembaga adat di tingkat *gampong* sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu di

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Wahyu Mimbar, Ustad/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, Tanggal 6 Mei 2013

mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Sebagai dasar hukum positif yang memiliki kekuatan legal, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum Islam.

Abu Zahrah, seorang ulama usul fiqh kenamaan yang dikutip Satria Efendi Zein, juga menegaskan bahwa :

Kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan. Namun demikian, persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu.<sup>12</sup>

Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, dapat saja didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris lain sehingga diharapkan warisan lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain dapat juga karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian, menjadi logis apabila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam masyarakat Kota Banda Aceh sudah memilih suatu kebiasaan menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian warisan.

---

<sup>12</sup>Satria Effendi Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta: 2004.

Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kalangan masyarakat yang terkena. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan adat dan adat merupakan sumber hukum yang terlebih dahulu diterapkan di Aceh. Meskipun jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam.<sup>13</sup>

Pada tingkat *gampong*, pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian warisan secara adat biasanya merupakan tanggung jawab *keuchik* (kepala *gampong/desa*), *imeum meunasah* (pemimpin keagamaan di *gampong/desa*), ulama lokal dan *tuha peut* (tetua *gampong/desa*). Kalau terjadi suatu sengketa, para pemimpin *gampong* tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah atau konsultasi. Dalam proses tersebut, seorang pemimpin *gampong* akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian (*mediasi*). Lebih lanjut perlu pula diketahui bahwa, sebagian besar sengketa di Aceh penyelesaiannya jarang dilakukan melalui lembaga hukum formal, seperti kepolisian dan pengadilan. Banyak perselisihan dan sengketa tersebut diselesaikan secara adat di *gampong*.

Penyelesaian sengketa secara adat mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh. Adapun metode dan pola penyelesaian sengketa pembagian yang dapat ditempuh oleh masyarakat adat antara lain adalah yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian masalah kewarisan yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa biasanya mempunyai hubungan keluarga dekat.
3. *Duek ureung tuha*, yaitu Musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan ahliwaris yang berselisih.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Sanusi Husein, Ketua Majelis Adat Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Mei 2013

4. Penyelesaian melalui Lembaga Adat *Keujreun Blang*, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh *keujreun* terhadap berbagai sengketa tanah atau lahan garapan, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui Peradilan *Gampong*, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat *gampong* untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di *meunasah* atau masjid.
6. Penyelesaian melalui Peradilan *Mukim*, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat *mukim* untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan *gampong*.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *keuchik* di wilayah penelitian diketahui bahwa peran lembaga adat sebagai mediator di sini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal dalam masyarakat termasuk dalam hal ini apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan apabila para ahli waris tidak dapat menyelesaikannya sendiri dalam keluarga. Hal ini dilakukan apabila para ahli waris tidak mencapai kesepakatan dalam keluarga mengenai bersarnya bagian masing-masing. Pihak *Keuchik* bersama perangkat biasanya dilibatkan untuk mencari penyelesaian secara damai. Hal utama yang selalu menjadi perbincangan tidak hanya menangkut harta benda warisan tetapi juga menyangkut para ahli waris yang berhak.<sup>15</sup>

Persoalan warisan yang muncul bukan hanya terkait dengan harta yang ditinggalkan, tetapi juga terkait dengan para ahli waris, terutama ahli waris yang masih anak-anak. Namun semua persoalan ini masih bisa ditangani dengan baik. Sanusi Husein menambahkan bahwa setiap persoalan yang muncul dan diminta untuk diselesaikan di tingkat *gampong* akan melalui proses musyawarah.<sup>16</sup>

Sebagai contoh dapat dilihat dari mengenai penyelesaian warisan secara damai ini dapat dilihat uraian dibawah ini:

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Sanusi Husein, Ketua Majelis Adat Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Mei 2013

<sup>15</sup>Wawancara dengan Wahyu Mimbar, Ustad/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, Tanggal 6 Mei 2013

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sanusi Husein, Ketua Majelis Adat Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Mei 2013

Seorang muslim meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta warisan dan juga ahli waris yang terdiri dari seorang orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

Apabila mengikuti ketentuan yang ada menurut hukum Islam maka anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian dan anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian. Akan tetapi, kemudian diantara keduanya berdamai dengan berbagai pertimbangan dan kondisi sosial lainnya dan sepakat untuk membagi rata menjadi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan harta peninggalan orang tuanya.

Perdamaian mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris ini sah dilakukan, dimana keduanya memahami bagian masing-masing dan dengan rela melepas bagian yang menjadi haknya kepada ahli waris lain.

Setelah adanya kesepakatan dibuat sebuah akta atau surat perjanjian sebagai bukti untuk tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Proses perdamaian ini dapat dilakukan dengan melibatkan seorang penengah atau orang yang dituakan (imam mesjid, perangkat desa atau notaris) dan dapat juga langsung dilakukan oleh para ahli waris tanpa melibatkan pihak lain.

Penerapan tata cara pembagian warisan secara damai ini sebagaimana ditemui dalam masyarakat adat Aceh, dimana seorang pemimpin di tingkat *gampong* (*keuchik*) maupun tokoh masyarakat lainnya membantu para pihak (ahli waris) untuk mencapai kesepakatan bersama dalam membagi warisan, dimana para pihak (ahli waris) akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian. Masyarakat adat Aceh telah lama mempergunakan upaya damai dalam penyelesaian sengketa waris dengan tahapan sebagai berikut.

*Keuchik* atau perangkat *gampong* akan mengumpulkan semua ahli waris dan kemudian mengumpulkan para saksi. Setelah itu semua persoalan akan diutarakan di hadapan forum musyawarah, yang terdiri dari lembaga adat *gampong*, yakni *tuha peut*, *imam gampong*, dan bahkan terkadang juga dihadiri *imeum mukim*.

Pembahasan persoalan warisan ini biasanya dilakukan di balai *gampong*, kantor *keuchik*, ataupun meunasah *gampong* setempat. Pembahasan bisa memakan waktu lebih dari satu hari. Namun, pembahasan bisa juga tuntas dalam waktu satu hari,

Biasanya pihak keluarga yang ingin menyelesaikan persoalan warisan menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian pada tim musyawarah *gampong* ini, terutama pada *imeum gampong*. Persoalan warisan ini tentunya diselesaikan sesuai aturan agama Islam. Putusan yang dihasilkan dari tim musyawarah *gampong* menjadi pedoman bagi ahli waris dalam membagi warisannya.

Dalam hal ini pembagian warisan boleh saja didasarkan pada keinginan sang ahli waris, namun untuk tahap pertama, pembagian warisan tetap didasarkan

dengan aturan agama Islam. Walaupun demikian, jika sesudahnya ada pihak-pihak yang ingin membagi lagi haknya kepada ahli waris lainnya, hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga.

Ada pula penyelesaian kasus warisan dimana harta warisan pada akhirnya dikuasai dan dimanfaatkan untuk *gampong*. Hal ini dapat saja terjadi, jika semua ahli waris sudah tidak ada dan dengan dikuatkan dengan pernyataan para saksi. Harta warisan yang dikuasai oleh *gampong* tersebut kemudian dijadikan harta *gampong*, untuk dimanfaatkan bersama. Keputusan-keputusan ini selalu diambil dalam musyawarah *gampong*, yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan *gampong* dan tokoh agama serta tokoh adat, yang tergabung dalam *tuha peut*.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pembagian warisan oleh lembaga adat Aceh di Kota Banda Aceh dilakukan dengan membentuk suatu wadah pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan pembagian warisan yang terjadi di *gampong*. Dalam Rapat Adat *Gampong* inilah perselisihan antara ahli waris dicoba diselesaikan dengan damai. Pimpinan rapat dalam mengambil keputusan lebih banyak mengandalkan saksi sebagai alat bukti. Di sini kejujuran seorang saksi amat menentukan keputusan akhir musyawarah tersebut. Selain itu, pengetahuan aparat *gampong* juga ikut menentukan hasil keputusan rapat itu. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini mencakup pengetahuan tentang materi hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan pengetahuan tentang asal usul harta dan silsilah keluarga dari para ahli waris. Untuk menunjang pengetahuan aparat *gampong* tentang materi hukum, tak jarang seorang *teungku* (ulama) dari dayah diundang untuk menyampaikan ilmunya mengenai kewarisan Islam dalam rapat tersebut.

Penyelesaian perselisihan dengan cara damai melalui kesepakatan kedua belah pihak yang sangat amat dihormati dan lebih sering diimplementasikan oleh aparat *gampong* dalam pembagian harta warisan, walaupun penentuan hak bagian untuk masing-masing ahli waris akan berbeda dari apa yang sudah ditentukan oleh hukum formal maupun syariat Islam.

### C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Kota Banda Aceh

Dalam praktik penyelesaian sengketa adat dalam peradilan adat diselesaikan secara bertahap, di mana sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di *gampong* dimana perangkat *gampong* yang menjadi penengah. Apabila ditelaah mengenai proses dilakukannya penyelesaian sengketa pembagian warisan dengan melibatkan *keuchik* di tingkat *gampong* *Keuchik* dalam kedudukannya sebagai pimpinan pemerintahan *gampong* adalah sebagai negosiator atau mediator yang dengan sendirinya harus memiliki kemampuan menjalankan proses negosiasi dan mediasi atau penengah dari para pihak yang terlibat menyelesaikan sengketa warisan. Dalam hal ini *keuchik* bersama dengan perangkat *gampong* berwenang :

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar proses negosiasi dan mediasi sejak awal sampai akhir. Dalam hal ini *keuchik* bersama dengan perangkat *gampong* memfasilitasi pertemuan para pihak guna membicarakan semua kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.
2. Mempertahankan mekanisme dan momentum damai dalam negosiasi.  
*Keuchik* bersama dengan perangkat *gampong* berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan dimaksud dengan mengemukakan alibi masing-masing;
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak menemui hasil yang diharapkan. Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa sering merasa sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku terutama saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi.

Pilihan penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan *keuchik* dalam bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang



mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya sebagai berikut:

1. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain dan para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dan sengketa yang dipersengketakan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hasil dari proses penyelesaian sengketa tanah secara adat pada tingkat *gampong* di Kota Banda Aceh dituangkan dalam suatu kesepakatan damai yang merupakan hasil rumusan dari para pihak beserta *keuchik* dan perangkat *gampong*. Pada sebagian masyarakat walaupun bukti tertulis merupakan bukti yang diakui secara hukum kesepakatan secara lisan tetap menjadi pegangan utama, di mana sebagian masyarakat masih memegang teguh pernyataan yang diucapkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian melalui ijab kabul antara para pihak sebagai bukti terkuat karena diikuti oleh adanya pernyataan sumpah dari para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain pada sebagian masyarakat pernyataan secara lisan tentang ijab kabul untuk penyelesaian sengketa juga dipandang sebagai bukti layaknya bukti tertulis.

Kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti dari adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan menuangkan berbagai hal yang menyangkut objek sengketa waris baik berupa tanah maupun harta benda lainnya. Kekuatan hukum atas kesepakatan tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan diakui oleh para pihak layaknya suatu putusan hakim dan berlaku serta mengikat para pihak yang bersengketa.

Adanya pengakuan dan efektifnya berlaku suatu putusan lembaga ada juga disebabkan karena tokoh para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan damai.

Beberapa tanggung jawab para pemangku adat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam peradilan adat dipegang teguh dalam setiap proses penyelesaian sengketa secara adat.<sup>17</sup>

Adapun bentuk tanggung jawab yang menjadi jaminan efektifitas berlakunya putusan lembaga adat adalah lembaga adat dimaksud :

1. Melaksanakan proses peradilan adat

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.

2. Memutuskan dengan adil

Para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.

3. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.

4. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan

Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.

5. Mengarsipkan berkas perkara

Berkas perkara termasuk surat pejanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Sanusi Husein, Ketua Majelis Adat Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Mei 2013

## V. Kesimpulan Dan Saran

### A. Kesimpulan

1. Alasan masyarakat Kota Banda Aceh lebih memilih lembaga adat Aceh sebagai tempat menyelesaikan sengketa pembagian warisan adalah karena penyelesaian melalui musyawarah di tingkat *gampong* bersifat sukarela dalam prosesnya, prosedur yang tepat sasaran, keputusan bukan layaknya putusan lembaga peradilan (menang atau kalah) karena keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, terpelihara hubungan sosial di masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil putusan lebih mudah.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa pembagian warisan oleh lembaga adat Aceh di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melibatkan lembaga adat *gampong* dalam hal ini *keuchik* dan aparatur *gampong*. Sengketa diawali oleh adanya perselisihan dalam pembagian warisan dalam masyarakat yang melibatkan para ahli waris. Guna menghindari sengketa lebih lanjut pihak keluarga menyarankan agar dilakukan penyelesaian melalui lembaga adat *keuchik* dan aparatur *gampong*. Kemudian *keuchik* dan aparatur *gampong* memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang berselisih guna bermusyawarah dengan menjadi penengah (*mediator*) guna memutuskan dengan adil perselisihan dan mengakiri sengketa dengan suatu kesepakatan damai. Kesepakatan dimaksud merupakan penyelesaian yang ditujukan untuk melindungi para pihak dalam hal ini ahli waris yang bersengketa. Musyawarah yang diselenggarakan *keuchik* bersama *imeum meunasah, tuha peut*, ulama/cendikiawan dan bersifat terbuka untuk umum karena pelaksanaannya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Pelaksanaan putusan lembaga adat Aceh dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Kota Banda Aceh diakui sebagaimana layaknya sebuah putusan hakim sehingga berlaku serta mengikat para pihak yang bersengketa dalam hal ini para ahli waris yang semula bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat mengakui eksistensi putusan suatu lembaga adat walaupun terkadang kesepakatan yang dibuat tersebut tidak dalam bentuk

tertulis dan hanya berupa pernyataan sikap atau ijab kabul antara para pihak yang bersengketa. Apabila kesepakatan atau putusan lembaga adat dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dijadikan sebagai bukti tertulis dari adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan menuangkan berbagai hal yang menyangkut objek sengketa atau harta benda warisan yang dipersengketakan.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Kota Banda Aceh disarankan agar tetap mempertahankan menyelesaikan perselisihan pembagian warisan secara damai melalui lembaga adat karena sesuai dengan mekanisme yang dianjurkan dalam syariat Islam.
2. Kepada lembaga adat yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan pembagian warisan, diharapkan untuk dapat membuka pola pikir para pihak mengenai upaya damai dan berbagai aspek hukumnya serta ruang lingkupnya khususnya dalam penyelesaian perselisihan dan sengketa di tingkat *gampong*, sehingga apabila timbul sengketa dapat memberikan sumbang pikiran dan mencari jalan terbaik dalam hal penyelesaiannya.
3. Disarankan kepada lembaga adat di tingkat *gampong* agar terhadap penyelesaian yang melibatkannya juga diupayakan memberikan pengertian kepada masyarakat membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis sehingga dapat menjadi alat bukti di kemudian hari selain itu, mengupayakan pencatatan sampai ke tingkat kecamatan mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku Teks**

- Ali Aş-Şabūnī, Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1998.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2008,
- Factur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Alma'arif, Bandung, 1991

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat Dalam Yuridisprudensi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1993.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1968,
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi*, LP3S, Jakarta, 1986.
- , *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- , *Hukum Adat Indonesia*,, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1966.
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung. 1998.
- Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
- Sudiyat. Iman, *Asas-asas Hukum Adat*, liberty, Yogyakarta, 2000.
- Syahrin, Alvi, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Aceh, 2004.
- Thaib, M. Hasballah, *Ilmu Hukum Waris Islam*, MKn USU, Medan, 2009.
- Wingjodipuro, Suroyo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1989.

Wiranata, I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Djilid I, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.

Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al Qur'an V*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008.

-----, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung, 2013.

Zein, Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Kehidupan Adat*

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Gampong*

## **C. Artikel dan Internet**

Ismail, H. Badruzzaman, *Pengaruh Faktor Budaya Aceh Dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi*, diambil dari [www.acehinstitute.org](http://www.acehinstitute.org) pada tanggal 10 Agustus 2010

Irsyad, Mohd. Zaim, *Struktur Dan Lembaga Adat Di Aceh*, <http://misteraim.blogspot.com/html>, Diakses 17 April 2013

Mukhlis, T., *Lembaga Adat Gampong Sebagai Pengendalian Sosial masyarakat Terhadap Pelaksanaansyari'at Islam Di Aceh*, <http://id.scribd.com/doc/> Diakses Desember 2012

Wikipedia, *Hukum Adat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, Diakses, 17 Maret 2013 Pukul 20.30 Wib